

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pembangunan pertanian menjadi salah satu isu sangat penting dewasa ini. Pembangunan pertanian bukan semata-mata menyediakan pangan yang cukup bagi semua warga suatu bangsa (Yuwono, 2011). Di satu sisi, pembangunan pertanian juga tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan berkelanjutan (Widiputranti, 2005).

Isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global, terbukti dengan perbincangan dan perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan yang diawali oleh terbitnya Brundtland Report pada tahun 1980, semakin diintensifkan dengan Konferensi PBB mengenai “Lingkungan Hidup dan Pembangunan“ di Rio de Janeiro tahun 1992. Konferensi ini melahirkan Agenda 21 yang ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagai langkah konkret bagi implementasi pembangunan berkelanjutan pada skala global. Sepuluh tahun setelah *Rio Conference*, PBB pada tahun 2002 kembali menyelenggarakan konferensi di Johannesburg dengan judul “*The 2002 World Summit for Sustainable Development*” untuk mengevaluasi perkembangan penerapan visi pembangunan berkelanjutan di dunia.

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mensejahterakan rakyat, demikian juga pembangunan pertanian bertujuan untuk mensejahterakan petani. Inti upaya mensejahterakan petani adalah membuat pertanian maju. Untuk membuat pertanian dan petani maju, perlu perjuangan setiap keluarga petani dalam mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana, keluarga petani dikatakan sejahtera ketika dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, sehingga paradigma baru pertanian di Abad 21 adalah dengan menetapkan keberdayaan petani sebagai salah satu fokus pembangunan pertanian (Sunarti dan Khomsan, 2012).

Paradigma pembangunan pertanian tidak akan memfokuskan kegiatan operasionalnya pada kenaikan produktivitas sektor pertanian saja. Lebih dari itu, paradigma pembangunan pertanian bertujuan untuk lebih menjamin ketahanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, baik untuk masing-masing keluarga maupun secara nasional (Sutrisno, 2002). Hal ini juga dipertegas oleh Departemen Pertanian dalam Widiputranti (2005) yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan pertanian adalah mewujudkan pertanian tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini menghendaki perubahan pendekatan penyuluhan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan agribisnis. Pendekatan baru ini mengharuskan para penyuluh pertanian melihat usaha yang dikelola oleh petani (*on farm*) sebagai bagian bagi sistem agribisnis.

Agribisnis sapi perah di Indonesia merupakan industri peternakan rakyat karena yang mengusahakan adalah peternak skala kecil sampai skala besar. Hanya sedikit perusahaan yang mengelola budidaya sapi perah (Firman, 2010). Menurut Erwidodo (1998) dan Swastika (2005), peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas.

Kondisi peternak sapi perah menurut Direktorat Budidaya Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2012) tercatat jumlah peternak sapi perah di Indonesia \pm 203.980 peternak dengan jumlah sapi perah \pm 611.940 ekor. Secara geografis penyebaran sapi perah tidak merata di seluruh tanah air, sebagian besar sapi perah atau 97% dari populasi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Rataan produksi susu sapi perah per ekor sekitar 10,5 liter/hari. Rendahnya produktivitas sapi perah di Indonesia salah satu penyebabnya adalah 95% sapi perah dikelola oleh peternak kecil dengan skala usaha 3-4 ekor sapi perah. Motif usahanya adalah rumah tangga yang dilakukan sebagai usaha sampingan atau usaha utama, masih jauh dari teknologi serta didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang masih lemah.

Berkaitan dengan produksi susu sapi perah, Peternak Pujon Kabupaten Malang, Jawa Timur, hanya menghasilkan 8-9 liter /ekor/hari. Adapun harga susu berkisar Rp. 3.400 – Rp. 3.500/liter, sedangkan harga konsentrat Rp. 2.280/kg. Jika dihitung secara cermat, peternak memperoleh pendapatan yang sangat kecil (Abrianto, 2011). Hal ini dapat dimengerti, seperti yang juga dialami peternak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka makin terjepit menghadapi kenaikan harga pakan konvensional seperti konsentrat dan rumput sejak akhir tahun 2011 dan mengeluhkan kenaikan biaya produksi hingga 40% yang tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual susu. Harga pakan yang tinggi membebani para peternak sapi perah. Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan harian terdiri dari pakan dan obat mencapai Rp. 30.000/ekor. Artinya untuk lima ekor sapi perah pengeluarannya Rp. 150.000. Produksi susu maksimal 10 liter/ekor/hari. Harga susu/liter berkisar Rp. 2700 - Rp. 3100. Hasil penjualan susu ± Rp. 155.000. Ini masih harus membayar biaya tenaga kerja. Melihat selisih antara pengeluaran dan penjualan susu, peternak tidak memperoleh laba (Khomsan, 2012). Harga tersebut berkaitan dengan Total Solid (TS) yang terkandung dalam susu berkisar di angka 11. Padahal TS yang dibutuhkan IPS (Industri Pengolah Susu) mencapai angka 12. Rendahnya TS ini juga mempengaruhi harga susu/liter (Boediyana, 2009). Kecilnya produksi susu setiap satu ekor sapi, dikarenakan kualitas konsentrat yang beredar di masyarakat tidak memenuhi standart baku (Firman, 2010). Hasil pemeriksaan Bamualim *et al.* (2009) terhadap beberapa konsentrat yang beredar dimasyarakat menunjukkan nilai TDN (*Total Digestible Nutrient= Total Nutrisi Tercerna*)-nya kurang dari 55% dan protein kasar di bawah 13 %. Selain itu kecilnya produksi susu juga disebabkan faktor bibit sapi perah yang ditenakkan masyarakat tergolong berkualitas kurang memadai (Mukson *et al.* 2009).

Nasib peternak sapi perah hingga saat ini masih sangat bergantung pada Industri Pengolahan Susu (IPS). Pasalnya, mereka tidak punya pilihan lain untuk memasarkan susu segar yang dihasilkan. 95% dari susu segar peternak dipasarkan ke IPS sebagai bahan baku. Meskipun IPS tetap menyerap susu segar yang dihasilkan peternak, tetapi Pemerintah tidak lagi dapat melindungi peternak dalam hal memperoleh harga yang layak untuk kehidupan mereka (Boediyana, 2009).

Buruknya kualitas sapi yang ditenak disebabkan beberapa faktor. Kemampuan sapi perah dalam menghasilkan susu ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan dan pemberian pakan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi susu antara lain umur sapi, musim beranak, masa kering-masa kosong, besar sapi, manajemen pemeliharaan dan pakan (Pradana, 2010).

Sebenarnya telah ada rekomendasi tentang besaran skala usaha yang harus dimiliki peternak agar mencapai kelayakan usaha. Skala usaha agribisnis sapi perah diartikan sebagai jumlah sapi perah induk yang dipelihara, baik yang sedang laktasi (menyusui) maupun yang sedang tidak menyusui (yang dikenal dengan istilah sapi kering kandang) (Ditjen Peternakan, 1996). Hasil Lokakarya Kebijakan Pengembangan Industri Peternakan Modern yang diadakan pada tahun 2001 oleh Forum Komunikasi Peternakan Bogor, merekomendasikan bahwa peningkatan skala usaha yang ideal untuk agribisnis sapi perah yaitu minimum 7 ekor induk yang berproduksi susu sepanjang tahun. Hal senada dinyatakan oleh Yunasaf (2008), bahwa untuk mencapai kelayakan usaha, skala pemilikan sapi 10 – 15 ekor atau rata-rata 7 – 8 ekor sapi laktasi. Untuk mempertahankan jumlah tersebut, memang jumlah sapi yang dipelihara minimum 10 ekor induk (Forum Komunikasi Peternakan, 2001). Jumlah induk ini untuk mengatasi jika sapi yang dipelihara ada yang sedang kering kandang. Penelitian Siregar (2000) menunjukkan bahwa dari jumlah sapi perah induk yang dipelihara sepanjang tahun mengalami kering kandang 20 -30 %. Untuk itu peternak harus dapat menyiasati kondisi agar pendapatan tidak menurun. Menurut Kusnadi *et al.* (1983), perimbangan pemeliharaan sapi laktasi dengan sapi non produktif adalah: 0,40. Artinya satu ekor sapi perah laktasi hanya akan mampu menanggung biaya pemeliharaan 0,40 Animal Unit (AU) sapi perah non produktif.

Berkaitan kemampuan berproduksi sapi perah, salah satu faktor yang menentukan adalah pakan yang terdiri dari hijauan dan konsentrat. Berdasarkan rekomendasi Standart Nasional Indonesia (SNI), konsentrat yang bagus mengandung kadar protein kasar minimal 18 % dan energi TDN minimal 75% dari bahan kering (Siregar, 1996). Agar dapat meningkatkan kemampuan berproduksi susu maka frekuensi pemberian konsentrat harus ditingkatkan

minimal 3 kali dalam sehari semalam. Sedangkan frekuensi pemberian hijauan harus dilakukan sesering mungkin dan pemberiannya dimulai pada sekitar 1,5 – 2 jam setelah pemberian konsentrat. Pemberian hijauan sesering mungkin dilakukan secara tahap demi tahap dalam jumlah sedikit demi sedikit. Sebagai suatu informasi dapat dikemukakan, bahwa suplemen konsentrat sebanyak 2,5 kg/ekor/hari dan pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari semalam dapat meningkatkan kemampuan berproduksi susu rata-rata harian 0,3 liter/ekor/hari (Siregar, 2001). Pemberian konsentrat yang berkualitas baik, maka sapi perah induk masih ekonomis untuk dipelihara sampai 10-11 periode laktasi.

Jika sapi induk memiliki kemampuan tinggi dalam memproduksi susu, frekuensi pemerahan dapat ditingkatkan menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari. Penelitian yang dilakukan di Institut Penelitian Ternak di Denmark mendapatkan terjadinya peningkatan kemampuan berproduksi susu sapi perah induk rata-rata 154,78% dengan melakukan frekuensi pemberian konsentrat dan pemerahan dari 2 kali menjadi 4 kali dalam sehari semalam (Collough, 1973 cit. Rosdiana *et al.*, 2009). Hal ini dikarenakan alveol-alveol dalam ambing sapi perah akan berfungsi secara optimal apabila ambing telah kosong karena diperah dan akan menurun fungsinya dalam memproduksi susu kalau ambing sudah penuh dengan susu.

Produksi meningkat seharusnya diimbangi dengan harga jual yang akan memberi keuntungan. Ini merupakan dambaan semua peternak. Harga jual susu didasarkan pada biaya produksi. Pada agribisnis sapi perah biaya produksi yang terbesar adalah pada pakan konsentrat. Penelitian yang telah dilakukan pada agribisnis sapi perah, mendapatkan bahwa biaya pakan konsentrat mencapai 54,56% dari keseluruhan biaya produksi susu. Hasil pengkajian lapangan mendapatkan bahwa peternak baru bisa memperoleh keuntungan dalam usaha agribisnisnya, apabila harga jual susu per liter paling sedikit 2,1 kali harga per kg pakan konsentrat (Daryono *et al.*, 1989).

Agar peternak dapat menjual susu sesuai dengan harga jual yang memadai, harus ada campur tangan koperasi susu sebagai mediator antara IPS dengan peternak. Disini koperasi harus memiliki daya tawar yang seimbang terhadap IPS karena kualitas susu peternak yang memenuhi standar IPS (Firman, 2010).

Paparan tentang kondisi peternak sapi perah yang senyatanya, ternyata berbeda dengan kondisi yang seharusnya dimiliki oleh peternak sapi. Kondisi peternak yang senyatanya itu, bukan terjadi secara alami. Ada penyebab yang menurut pendapat Martinez (1997) merupakan pengaruh paham neoliberalisme yang menambah ketidak berdayaan peternak sapi perah mikro. Adapun poin utama neoliberalisme menurut Martinez (1997) maupun Fakhri (2003), meliputi :

1. Aturan pasar, yaitu pasar mengatur dirinya sendiri. Berakibat perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah. Pada tata niaga susu, IPS (Industri Pengolah Susu) bebas melakukan impor susu bubuk dari luar negeri.
2. Mengurangi pengeluaran anggaran, seperti subsidi untuk layanan sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) oleh pemerintah. Pemerintah menghapus penyertaan Busep (Bukti Serap) susu lokal, jika IPS melakukan impor susu.
3. Deregulasi, untuk memungkinkan kekuatan pasar bertindak sebagai mekanisme pengaturan sendiri (pasar bebas). Mengakibatkan harga susu ditingkat peternak tergantung pada harga susu dunia.
4. Privatisasi semua badan usaha Negara, termasuk perusahaan strategis yang melayani kepentingan rakyat (PLN, sekolah, rumah sakit). Ini memaksa rakyat kecil termasuk peternak mikro membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka.
5. Mengubah persepsi masyarakat terhadap “tanggung jawab individual”. Masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Golongan paling miskin di masyarakat akan menjadi korban gagasan ini karena merekalah yang paling kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Kondisi ini sebenarnya sudah diatasi dengan berbagai kebijakan yang muncul sekitar tahun 1980-1997, disebut periode masa keemasan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak perkembangan sapi perah. Upaya pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan yang bersifat lintas sektoral,

perlindungan atau proteksi terhadap usaha peternakan rakyat. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Koperasi, Pertanian, Perindustrian&Perdagangan), yaitu Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/82 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 bertujuan untuk Pengembangan Usaha, Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu Dalam Negeri. IPS harus menyertakan BUSEP (bukti serap) apabila akan mengimpor susu. Selanjutnya diterbitkan dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 1985 yang bertujuan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan SKB tiga Menteri. Pada tahun 1996, Pemerintah memperbaharui SKB tiga Menteri dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 322/MPP/KEP/10/1996 tentang rasio penyerapan susu dalam negeri dengan impor bahan baku susu semester II/1996 (Pradana, 2010). Pada tahun 1982 diterbitkan juga kebijakan pemasukan bibit ternak sapi perah dengan terbitnya tiga SK Menteri pertanian. Kebijakan-kebijakan ini menguntungkan peternak, ditandai dengan meningkatnya harga susu.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan meminjam uang ke IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Kondisi yang sudah buruk ini diperparah dengan kondisi nilai rupiah jatuh terhadap kurs US Dollar. Dampaknya berimbas pada sub sektor peternakan, khususnya industri persusuan. Industri persusuan ikut mengalami keterpurukan karena lebih banyak menggunakan komponen impor dari pada susu lokal (Firman, 2010). Upaya pemerintah saat itu ditujukan untuk membuat IPS (Industri Pengolah Susu) tetap mampu bertahan dalam kondisi krisis keuangan global. Upaya itu adalah ditandatanganinya kesepakatan antara Pemerintah RI (Republik Indonesia) dengan IMF(International Monetary Fund) pada bulan Januari 1998 tentang penghapusan tata niaga SSDN (Susu Segar Dalam Negeri), maka sejak itu sistem ratio BUSEP juga telah dihapus. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) no. 4 Tahun 1998. Keluarnya Inpres ini sebagai hasil perjanjian (*Letter of Intent* = Lol) pemerintah dengan *International Monetary Fund* (IMF). Selanjutnya penghapusan subsidi karena Indonesia sebagai negara yang mengikuti paham neoliberalisme, harus melaksanakan peran dengan melakukan empat hal, salah satunya adalah

pelaksanaan kebijakan anggaran ketat (Baswir, 2010). Saat komoditas susu memasuki pasar bebas, maka harus memiliki daya saing yang kuat untuk mengantisipasi masuknya bahan baku susu impor (Pradana, 2010).

Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan (*supply*) susu serta tingginya harga susu di tingkat konsumen, sejak bulan November 2008, pemerintah melakukan program peningkatan daya saing industri susu di dalam negeri yaitu dengan memberikan insentif fiskal berupa penangguhan bea masuk oleh pemerintah atas impor barang dan bahan olah industri pengolahan susu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2008). Selanjutnya pada bulan April 2009 dikeluarkan kebijakan terbaru mengenai penghapusan tarif impor masuk dari 5% menjadi 0% berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 19/PMK.011/2009. Penghapusan tarif impor ini juga sebagai “Program Stimulus Fiskal”. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa IPS memiliki pilihan yang kuat dalam menentukan harga kontrak, mengingat harga susu impor (bubuk) jauh lebih murah hingga 15% dari susu lokal (Pradana, 2010).

Kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi IPS, diduga memiliki efek negatif terhadap para produsen susu lokal. Penurunan tarif impor susu diduga berpengaruh kuat terhadap posisi tawar koperasi peternak susu dengan IPS, sehingga akan menyebabkan turunnya harga beli dari IPS yang berdampak merugikan bagi para peternak sapi perah lokal (Pradana, 2009). Pada tanggal 28 Mei 2009, atas desakan berbagai stakeholder persapiperahan, pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 dan menetapkan kembali tarif bea masuk sebesar 5% melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif BM (Biaya Masuk) Atas Impor Produk-produk Susu Tertentu (Firman, 2010). Adapun kebijakan tentang tataniaga SSDN yang mewajibkan IPS memiliki BUSEP SSDN jika mengimpor susu, tidak dikembalikan. Ini merupakan keberuntungan bagi IPS.

Kebijakan tentang SSDN sejak tahun 1998 sampai tahun 2009, belum membuat kondisi peternak sapi perah membaik, karena masih belum mendapatkan harga jual susu yang betul-betul menguntungkan. Selain itu posisi tawar mereka

juga masih lemah. Peternak benar-benar tak punya pilihan, mereka harus mengikuti tataniaga SSDN yang ada (Firman, 2010).

Selain kebijakan tentang tataniaga SSDN, ada kebijakan-kebijakan yang dapat dimanfaatkan peternak agar mampu menjangkau kualitas sapi yang baik untuk ditenak. Kebijakan Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2007, kebijakan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Kedua program ini untuk membantu peternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi bekerjasama dengan pihak perbankan. Dalam pelaksanaannya realisasi pemanfaatan kredit lambat, sehingga memungkinkan peternak mengalami kerugian karena kehilangan waktu. Peternak yang mendapat fasilitas KKPE dan KUPS masih terfokus pada kewajiban membayar angsuran tepat waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha seperti pakan, perkandangan, bibit hingga kelembagaan kurang dipertimbangkan dalam usaha ternak sapi. Padahal pengadaan sarana produksi yang cocok dengan kondisi peternak, sangat penting. Persyaratan KUPS bagi peternak pada umumnya sulit dilaksanakan dan persyaratan pencairan kreditnya lebih mahal dibandingkan KKPE (2,28% untuk KUPS dan 0,57% untuk KKPE dari total kredit) (Muryanto *et al.*, 2011).

Realitas kondisi peternak sapi perah yang berbeda dengan kondisi yang semestinya diperoleh peternak, menimbulkan pertanyaan mengapa ada perbedaan. Realitas kondisi peternak seperti aset (sapi perah) yang minim dan tidak memenuhi standart kelayakan skala usaha, tidak adanya peluang/kesempatan untuk ikut serta dalam penetapan harga susu dan penetapan kualitas susu, tidak memiliki pilihan dalam menghadapi kenaikan harga pakan dan kenaikan biaya produksi. Ini menunjukkan indikasi bahwa peternak dalam kondisi tidak memiliki kebebasan usaha. Jika dilihat dari antisipasi pemerintah terhadap kondisi peternak, pemerintah menggelontorkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, pada umumnya untuk melindungi elite pelaku usaha ternak sapi (IPS,

Bank, pengusaha pembibitan sapi) dan belum mampu menjangkau pelaku usaha mikro ternak sapi (peternak). Kondisi ini belum berubah sejak tahun 1998 hingga saat ini. Padahal seharusnya kebijakan itu mampu menjangkau semua *stakeholder* dalam industri persusuan. Hal ini nampak pada adanya indikasi bahwa peternak tidak memiliki pilihan selain mengikuti kebijakan yang lebih berorientasi kepentingan makro. Kebijakan lain selain yang berkaitan dengan industri persusuan, pemerintah juga menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan modal bagi peternak. Akan tetapi mereka yang mengikuti program pemerintah yang berkaitan dengan penguatan modal berupa perbaikan bibit ternak, ternyata juga tidak memiliki pilihan dalam menghadapi perlakuan Bank yang merugikan peternak dari segi waktu. Penggelontor berbagai kebijakan oleh pemerintah nampaknya tetap menunjukkan ada indikasi peternak tidak memiliki kebebasan usaha. Hal ini dikarenakan kebijakan/ struktur ekonomi tidak berpihak pada peternak kecil. Kebebasan dalam usaha merupakan salah satu indikasi dari keberdayaan (Suharto, 2005), maka keberdayaan peternak inilah yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang.

Telah banyak orang meneliti tentang keberdayaan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan, yaitu; proses pemberdayaan (Penelitian : Nurachma *et al.*, 2011; Yunasaf *et al.*, 2009; Sindu, 2007; Mahendrawati dan Devi, 2013), modal (modal manusia, modal fisik, modal sosial) (Penelitian: Sindu, 2007; Mahendrawati dan Devi, 2013), akses terhadap kekuatan non ekonomi (Politik, sosial budaya, Peranan penyuluh) (Penelitian: Anisa, 2007; Yunasaf *et al.*, 2009), akses terhadap kekuatan ekonomi (Penelitian: Anisa, 2007), tingkat kemampuan pelaku pemberdayaan (Penelitian: Sindu, 2007), dinamika kelompok (Penelitian: Yunasaf *et al.*, 2009), dan peran sebagai manajer dan individu yang otonom (Penelitian: Nurachma *et al.*, 2011; Yunasaf *et al.*, 2009).

Jika dilihat dari pendekatan yang digunakan para peneliti untuk mengkaji keberdayaan, maka para peneliti menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan pemberdayaan (Penelitian: Sindu dan Sugihen, 2007; Nurachma *et al.*, 2011), pendekatan aset komunitas dalam pengembangan masyarakat (Penelitian:

Wijayanti, 2010; Mahendrawati dan Devi, 2013), pendekatan kelompok (Penelitian: Yunasaf *et al.*, 2008).

Jika dilihat dari metodologi penelitian yang digunakan, para peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif (Penelitian: Anisa, 2007; Sindu, 2007; Sindu dan Sugihen, 2007; Yunasaf *et al.*, 2008; Yunasaf *et al.*, 2009; Nurachma *et al.*, 2011; Wijayanti, 2010; Mahendrawati dan Devi, 2013).

Jika dilihat dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan menunjukkan pengaruh yang rendah terhadap keberdayaan. Artinya ada ketidakberdayaan atau kondisi tidak berdaya berkaitan dengan/dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki tingkatan yang rendah. Jika meminjam istilah Sen (1999) kondisi atau kemampuan mengkondisikan diri disebut *ability to be*, maka hasil penelitian para peneliti dapat dikatakan kemampuan mengkondisikan dirinya rendah. Selanjutnya Sen mengatakan bahwa kemampuan mengkondisikan diri berkaitan dengan *ability to do* yaitu kemampuan berpeluang. Secara lengkap Sen (1999) berpendapat bahwa, pendekatan kapabilitas (*capability approach*) mengacu pada dua perkara, yaitu kemampuan berpeluang dan kemampuan mengkondisikan diri, yang disebut pencapaian diri (*functionings*). Kemampuan berpeluang berkaitan dengan keterampilan kemampuan (*capability deprivation*). Faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketidakberdayaan ini dalam istilah Sen disebut sebagai wujud dari tidak adanya kebebasan memilih (*freedom of choice*). Tidak adanya kebebasan memilih karena rendahnya kemampuan berpeluang. Rendahnya kemampuan berpeluang karena adanya keterampilan kemampuan. Jadi dapat dikatakan bahwa ketidakberdayaan berkaitan dengan keterampilan kemampuan. Ketidakberdayaan dapat dianalogkan dengan kemiskinan yang berkaitan dengan kebebasan memilih; orang miskin sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih karena terjadi keterampilan kemampuan. Itu berarti orang yang tidak berdaya tidak memiliki kebebasan memilih karena terjadi keterampilan kemampuan. Ketidakberdayaan dipahami sebagai keterampilan kemampuan, merupakan bagian dari pendekatan kapabilitas yang diajukan Sen (1999).

Paparan Sen untuk mengkaji keberdayaan sebagai *achievement functionings* (prestasi) dilakukan dengan melihat faktor-faktor kemampuan berpeluang, keterampilan kemampuan, dan kebebasan memilih, yang merupakan unsur dalam pendekatan kapabilitas. Pada penelitian yang pernah dilakukan, keberdayaan dikaji dengan pendekatan pemberdayaan, pendekatan asset komunitas dalam pengembangan masyarakat dan pendekatan kelompok. Belum pernah dilakukan penelitian yang mengkaji keberdayaan dengan pendekatan kapabilitas. Oleh sebab itu kajian keberdayaan dengan pendekatan kapabilitas yang berbeda dengan kajian keberdayaan dengan berbagai pendekatan seperti yang telah dilakukan para peneliti lain, perlu dilakukan. Perbedaan utama terletak pada banyaknya unsur yang terkandung dalam keberdayaan yang dicapai. Kajian keberdayaan dengan pendekatan kapabilitas meliputi 2 unsur yaitu kemampuan berpeluang dan kemampuan mengkondisikan diri, sedangkan kajian keberdayaan dengan berbagai pendekatan lain meliputi satu unsur yaitu kondisi diri.

Pendekatan kapabilitas memang sudah sering digunakan mengkaji berbagai bidang, yang paling menonjol adalah pemikiran pembangunan, kesejahteraan ekonomi, kebijakan sosial dan filsafat politik. Selain itu digunakan juga untuk mengevaluasi berbagai aspek kesejahteraan masyarakat seperti ketimpangan kesejahteraan individu, dan kemiskinan (Robeyns, 2003). Akan tetapi belum pernah digunakan untuk menganalisis keberdayaan. Problemanya adalah aspek kesejahteraan atau *well-being* dapat dicapai jika telah mencapai keberdayaan (*functioning* yang berharga) (Sen, 1980, 1985 *cit.* Sen, 1988). Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji keberdayaan peternak sapi perah dengan pendekatan kapabilitas, lebih lengkapnya “Kajian Keberdayaan Peternak Sapi Perah Dengan Pendekatan Kapabilitas”. Kekuatan pendekatan kapabilitas adalah mengefektifkan kemampuan yang dimiliki untuk menempatkan diri pada suatu kondisi yang diinginkan (Robeyns, 2003). Pandangan pendekatan studi ini, bahwa pendekatan kapabilitas sebagai kerangka normatif (Robeyns, 2003) untuk menjelaskan keberdayaan.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Peternak di lokasi ini memiliki komoditi yang dapat difungsikan (*functional*

commodity) dalam usaha sapi perah, dengan skala kelayakan usaha yang belum standar. Rata-rata kepemilikan sapi 1-4 ekor sapi. Kandang yang dimiliki rata-rata kondisinya kurang memadai. Lahan hijauan yang dimiliki rata-rata sempit. Rata-rata produksi 10-15 liter susu/hari (Triharyanto *et al.*, 2014). Peternak tidak berpeluang/berkesempatan menjual sendiri hasil produksinya (susu) ke koperasi pengumpul, apalagi ke IPS. Penjualan susu sebagian besar ke loper. Loper juga penentu harga jual susu/liter. Harga jual diacu dari harga jual susu ke Koperasi maupun IPS. Selain itu loper juga sebagai pemasok pakan ternak, dengan harga yang lebih mahal dari harga pabrik. Peternak tidak memiliki peluang untuk membeli pakan dengan harga murah (harga pabrik) karena peternak terikat kesepakatan pembayaran hasil jual susu dengan loper. Loper akan memberikan pembayaran setiap 10 hari sekali dan selama rentang waktu itu peternak berhutang pakan kepada loper. Pembayaran pakan dengan cara memotong hasil penjualan susu. Tidak hanya pinjaman pembelian pakan yang dilayani oleh loper, tetapi diberikan juga pinjaman pembelian obat-obatan sapi. Dalam hal penjualan susu dan pembelian pakan serta obat-obatan, peternak benar-benar tak punya pilihan selain melakukannya dengan loper, yang berarti peternak tidak memiliki pilihan. Kendalanya ada pada jaringan pasar susu sapi perah dan jaringan usaha sapi perah yang ada di kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Inilah yang membuat peternak mengalami keterampasan kemampuan, dalam hal ini oleh aturan-aturan dalam jaringan pemasaran susu maupun pembelian pakan. Peternak tak punya pilihan atau tak bebas memilih peluang-peluang dalam memasarkan susu maupun dalam pengadaan pakan (Devi, 2010). Selanjutnya kondisi peternak sulit menambah indukan sapi laktasi, sulit mencukupi biaya pemeliharaan dan perawatan, sulit mendapatkan modal (Triharyanto *et al.*, 2014).

Melihat paparan kondisi di lokasi penelitian, nampaknya ada kebergunaan/keberfungsian komoditas yang belum standar untuk kelayakan usaha, kemampuan berpeluang rendah, mengalami keterampasan kemampuan, tidak memiliki kebebasan memilih dan kemampuan mengkondisikan diri rendah. Semua ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan di lokasi

penelitian. Hal ini dapat dikatakan bahwa keberdayaanlah yang menjadi masalah dilokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Kondisi peternak sapi perah tidak memenuhi standart kelayakan skala usaha, tidak ada peluang/kesempatan untuk ikut serta dalam penetapan harga susu dan penetapan kualitas susu, tidak memiliki pilihan dalam menghadapi kenaikan harga pakan dan kenaikan biaya produksi. Kebijakan yang diterbitkan pada umumnya untuk melindungi elite pelaku usaha ternak sapi (IPS, Bank, pengusaha pembibitan sapi) dan belum mampu menjangkau pelaku usaha mikro ternak sapi (peternak). Kondisi ini terjadi pada kurun waktu mulai tahun 1998 hingga saat ini. Seharusnya kondisi peternak sapi perah lebih menguntungkan dari pada periode sekitar tahun 1980 – 1997, karena seluruh kebijakan mampu menjangkau semua *stakeholder* dalam industri persusuan. Pada saat ini, walaupun sudah digelontor berbagai kebijakan, peternak sapi perah tidak memiliki kebebasan usaha. Kebebasan usaha adalah indikasi keberdayaan, maka keberdayaan peternak sapi perah inilah yang perlu dipermasalahan.

Keberdayaan sebenarnya telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian. Akan tetapi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji keberdayaan, maka hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keberdayaan rendah atau dalam kondisi tidak berdaya. Ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan juga pada tingkatan yang rendah. Meminjam istilah Sen kondisi tidak berdaya ini sebagai kemampuan mengkondisikan diri yang rendah. Dalam kerangka pikir Sen yang mempengaruhi derajat pencapaian diri dengan kemampuan mengkondisikan diri itu adalah kemampuan berpeluang, keterampilan kemampuan dan kebebasan memilih. Semua unsur ini adalah unsur dalam pendekatan kapabilitas menurut Sen.

Mengkaji keberdayaan sebagai prestasi dengan melihat faktor-faktor kemampuan berpeluang, keterampilan kemampuan dan kebebasan memilih yang merupakan unsur dalam pendekatan kapabilitas, belum pernah digunakan dalam

penelitian keberdayaan oleh peneliti lain. Oleh sebab itu kajian keberdayaan dengan pendekatan kapabilitas yang berbeda dengan kajian keberdayaan dengan berbagai pendekatan seperti yang telah dilakukan para peneliti lain, perlu dilakukan.

Jika melihat kondisi di lokasi penelitian, nampaknya ada keberfungsian komoditas yang belum standar untuk kelayakan usaha (rata-rata kepemilikan sapi 1-4 ekor, rata-rata kondisi kandang kurang memadai, rata-rata lahan hijau sempit, rata-rata produksi susu 10-15 liter/hari). Peternak memiliki kemampuan berpeluang rendah (peternak tidak memiliki peluang untuk menjual sendiri hasil produksinya maupun membeli pakan dengan harga pabrik). Mengalami keterampilan kemampuan (panjangnya mata rantai jaringan pasar susu dan jaringan usaha sapi perah). Peternak tidak memiliki kebebasan memilih (penjualan susu melalui loper, penentuan harga jual susu oleh loper, pembelian pakan dan obat-obatan untuk kesehatan sapi melalui loper). Peternak memiliki kemampuan mengkondisikan diri yang rendah (peternak sulit menambah indukan sapi laktasi, sulit mencukupi biaya pemeliharaan dan perawatan sapi perah, sulit mendapatkan modal). Semua ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan di lokasi penelitian.

Menyimak hal-hal yang seharusnya dan senyatanya yang telah dipaparkan di atas, ternyata ada kesenjangan (*gap*) yang memunculkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini dan sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi, adalah sebagai berikut :

1. Terletak pada derajat kategori apakah tingkat kebergunaan komoditas oleh peternak, tingkat keterampilan kemampuan peternak, tingkat kapabilitas peternak, tingkat kebebasan memilih kesempatan oleh peternak dan tingkat keberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang?
2. Adakah pengaruh langsung tingkat kebergunaan komoditas oleh peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah?
3. Adakah pengaruh tak langsung tingkat kebergunaan komoditas oleh peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah melalui

tingkat kapabilitas peternak dan tingkat kebebasan memilih kesempatan oleh peternak, di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang?

4. Adakah pengaruh langsung tingkat keterampilan kemampuan peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah?
5. Adakah pengaruh tak langsung tingkat keterampilan kemampuan peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah melalui tingkat kapabilitas peternak dan tingkat kebebasan memilih kesempatan oleh peternak, di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang?
6. Adakah temuan model keberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengukur derajat kategori tingkat kebergunaan komoditas oleh peternak, tingkat keterampilan kemampuan peternak, tingkat kapabilitas peternak, tingkat kebebasan memilih kesempatan oleh peternak dan tingkat keberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis pengaruh langsung tingkat kebergunaan komoditas oleh peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah.
3. Menganalisis besarnya pengaruh tak langsung tingkat kebergunaan komoditas oleh peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah melalui tingkat kapabilitas peternak dan tingkat kebebasan memilih kesempatan oleh peternak, di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
4. Menganalisis pengaruh langsung tingkat keterampilan kemampuan peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah.
5. Menganalisis besarnya pengaruh tak langsung tingkat keterampilan kemampuan peternak terhadap tingkat keberdayaan peternak sapi perah melalui tingkat kapabilitas peternak dan tingkat kebebasan memilih kesempatan oleh peternak, di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
6. Menemukan model keberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis:

Menemukan model keberdayaan peternak sapi perah dengan pendekatan kapabilitas dan ditambahkan ke dalam *body of knowledge*.

2. Manfaat praktis:

Memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa keberdayaan yang dibutuhkan dalam kehidupannya dapat dipilih dari peluang (*doing*) yang dipandang berharga sesuai dengan kondisi yang mengikutinya (*being*). Adapun keberdayaan yang selama ini ada menekankan pada diberikannya “pengakuan” oleh subyek (penguasa) sebagai bukti bahwa masyarakat mempunyai daya. Mengalirnya daya dapat berwujud suatu upaya dari obyek (yang dikuasai) untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu dengan daya yang dimiliki subyek (penguasa). Keberdayaan yang selama ini ada tidak dapat mengubah dari objek menjadi subjek karena kemampuan berpeluang masyarakat rendah. kemampuan berpeluang rendah karena tidak memiliki kebebasan memilih.

E. Kebaharuan Penelitian

Beberapa aspek sebagai kebaruan pada penelitian ini, dijelaskan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan sekaligus memperlihatkan perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1. Nama Peneliti, Judul Penelitian, Fokus Kajian, Metode, Pendekatan dan Hasil Penelitian Sebagai Rujukan pada Penelitian Ini.

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Hamidah Nayati Utami. 2001. Keberdayaan dan Keberlanjutan Usaha Pengrajin : Kasus Kab. Sukoharjo dan	Menganalisis keberdayaan pengrajin melalui: 1) Kualitas perilaku 2) Tingkat kemandirian	Kuantitatif	Pendekatan Pemberdayaan	Pengrajin rata-rata masih memiliki kualitas perilaku wirausaha dan tingkat kemandirian usaha yang relatif

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
	Kab. Magetan, Prop. Jatim. Disertasi.Sekolah Pascasarjana.IPB. Bogor.				masih rendah.
2.	Unang Yunasaf. 2009. Dinamika Kelompok Peternak Sapi Perah dan Keberdayaan Anggota di Kabupaten Bandung. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. IPB.Bogor.	Analisis tingkat keberdayaan peternak sapi perah dipengaruhi oleh Dinamika kelompok.	Kuantitatif	Pendekatan kelompok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberdayaan peternak, rata-rata tergolong rendah. Dinamika kelompok peternak dengan keberdayaan peternak menunjukkan hubungan yang sangat nyata. Tinggi rendahnya keberdayaan peternak sapi perah berhubungan dengan tinggi rendahnya dinamika kelompok.
3	A A I N Marhaeni. 2011. Tingkat Keberdayaan Perempuan Bali dalam Jabatan Eselon di Provinsi Bali: Ditinjau dari Dimensi Internal Dan Eksternal, Disertasi.Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.	Mengkaji tingkat keberdayaan melalui faktor internal : motivasi berprestasi, human capital, hambatan sosial psikologis dan faktor eksternal : demografi, budaya, serta hambatan struktural.	Kuantitatif	Pendekatan Keberdayaan	1) Faktor yang berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat keberdayaan yaitu motivasi berprestasi, human capital, hambatan sosial psikologis. 2) Faktor yang berpengaruh signifikan negatif yaitu demografi, budaya, serta hambatan struktural.

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
4	Dewangga Nikmatullah.2013. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). Disertasi.Program Studi Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat. Program Pasca Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.	Mengkaji keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan melalui proses pemberdayaan masyarakat miskin.	Kualitatif	Pendekatan Pemberdayaan	Dalam penelitian ini proses pemberdayaan yang dilihat dari : tingkat kedinamisan kelompok, partisipasi masyarakat, persepsi masyarakat, dukungan birokrasi, dukungan kelembagaan, persepsi demokrasi dalam tingkatan baik.
5	Pramono Hadi, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan: Kasus PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant. Disertasi. Program Studi Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat. Program Pasca Sarjana. UNS.	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberdayaan penilaian manfaat pemberdayaan melalui kegiatan CSR perusahaan.	Kuantitatif	Pendekatan Pemberdayaan	Keberdayaan manfaat pemberdayaan salah satunya berasal dari keberdayaan penilaian hasil-hasil pemberdayaan

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
6	Argyo Demartoto. 2012. Pemberdayaan Perempuan dalam Pariwisata Berbasis Komunitas (Studi Kasus Tiga Desa Wisata di Jawa Tengah). Disertasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.	Mengkaji keberdayaan perempuan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.	Kualitatif	Pendekatan Pemberdayaan (<i>Community Development</i>)	Keberdayaan perempuan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas masih rendah karena peran sebagai inisiator dan perencana, investor, serta pemantau dan evaluator masih rendah
7	Azis Muslim. 2014. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Tanggung Jawab Sosial Masjid. Disertasi. Universitas Sebelas Maret Program Studi Penyuluhan Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat. Program Pasca Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.	Mengkaji keberdayaan ekonomi masyarakat miskin perkotaan melalui 13 variabel yang dikelompokkan menjadi 3 komponen yaitu : 1) Komponen input pemberdayaan : lembaga keuangan berbasis masjid, tata kelola masjid, sasaran pemberdayaan, kerja sama. 2) Komponen proses pemberdayaan : membangun spiritualis, membangun kesadaran wirausaha, pemberian kapasitas, pemberian daya. Komponen output pemberdayaan: penguatan karakter, penguatan ekonomi, penguatan ikatan emosional, penguatan kelembagaan	Kualitatif	Pendekatan pemberdayaan	Keberdayaan ekonomi jemaah berwujud 1) Kepemilikan lembaga keuangan sendiri mendorong keberhasilan pemberdayaan ekonomi 2) Tata kelola masjid sangat mendukung untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat masjid 3) Semakin besar dan kuat jamaah, bantuan dari luar semakin tidak dibutuhkan oleh masjid untuk pemberdayaan ekonomi 4) Terbangunnya kesadaran bekerja Memberikan kapasitas dalam rangka membina usaha 5) Menyiapkan bantuan daya untuk membangun usaha

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
8	Slotje. 1991. Measuring the quality of life across countries. <i>Review of Economics and Statistics</i> , 73 (4).	Mengukur indeks kesejahteraan (<i>wellbeing</i>) bagi 126 negara dengan menggunakan sebanyak 20 indikator.	Kuantitatif	Pendekatan kapabilitas	Menghasilkan Indeks Kualitas Hidup peringkat dunia yang bervariasi berdasarkan data dari indikator kesejahteraan ekonomi yang dijadikan satu dengan ikhtisar indeks
9	Ellman. 1994. The increase and disease under 'katastroika'. <i>Cambridge Journal of Economics</i> , 18.	Mengukur kesejahteraan (<i>wellbeing</i>) yang berkonsentrasi pada harga, pendapatan dan konsumsi pengaruhnya terhadap mortalitas dan morbiditas periode tahun 1987-1993.	Kuantitatif	Pendekatan kapabilitas	Terdapat penurunan tajam standar kehidupan setelah runtuhnya Uni Soviet yang berefek negatif cukup parah pada mortalitas dan morbiditas
10	Balestrino. 1996. A Note on functionings-poverty in affluent societies. <i>Notizie di Politeia</i> , 12 (43).	Menganalisis kesejahteraan (<i>wellbeing</i>) dengan mempertanyakan 1) Apakah orang miskin berfungsi menjadi miskin? 2) Apakah orang miskin adalah orang yang pendapatan rendah? 3) Apakah orang miskin merupakan campuran keduanya?	Kuantitatif	Pendekatan kapabilitas	Menggunakan 281 sampel rumah tangga di Italia diketahui bahwa 73 diantaranya murni miskin <i>functionings</i> (yaitu dilihat dari berpendidikan rendah, bergizi buruk atau kesehatan buruk), 71 lainnya murni miskin pendapatan, dan 137 rumah tangga adalah murni miskin keduanya. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya tidak berpendapatan rendah

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
11	Balestrino and Sciclone. 2001. Should we use functionings instead of income to measure well-being? Theory, and some evidence from Italy. <i>Revisia Internazionale di Scienza Sociale</i> , 109 (1).	Menguji korelasi antara pendapatan dan functionings dalam membandingkan kesejahteraan (<i>wellbeing</i>) secara regional di Italia.	Kuantitatif	Pendekatan kapabilitas	Hasil korelasi antara peringkat berdasarkan functionings dan setiap peringkat berdasarkan pendapatan, adalah positif dan signifikan (peringkat berdasarkan pendapatan rata-rata/kapita merupakan ukuran indeks prestasi <i>functioning agregat</i>).
12	Phipps. 1999. The well-being of young Canadian children in international perspective . LIS-working paper No. 197. Differdange: INSTEAD	Perbandingan kesejahteraan (<i>wellbeing</i>) anak berusia 0-11 di Kanada, Norwegia dan AS, dengan menggunakan pendapatan rumah tangga yang dihubungkan dengan sepuluh <i>functionings</i> yang sangat spesifik (berat badan menjadi rendah, asma, kecelakaan, pembatasan aktivitas, sulit berkonsentrasi, ketidaktaatan di sekolah, pengganggu orang yang lemah, kecemasan, berbohong, hiperaktif).	Kuantitatif	Pendekatan kapabilitas	Anak-anak Kanada yang termasuk dalam pendapatan rumah tangga rendah, <i>functioning</i> nya lebih baik daripada anak-anak Amerika. Untuk pendapatan yang sama, anak-anak Norwegia ternyata lebih baik untuk 10 <i>functionings</i> dari pada anak-anak Kanada. Pengukuran <i>functionings</i> dan pendapatan memberikan informasi tambahan, dan masing-masing peringkat tidak sama

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
13	Chiappero-Martinetti. 2000. A multi dimensional assessment of well-being based on Sen's functioning theory. <i>Revista Internazionale di Scienza Soziali</i> , 108 (2).	Survei 1994 rumah tangga Italia mengukur kesejahteraan (<i>wellbeing</i>) dalam <i>functionings</i> dan kapabilitas. Diukur dengan 5 <i>functionings</i> (kesehatan, pendidikan, pengetahuan, interaksi sosial, kondisi psikologis), di 3 tingkat agregasi : wanitalanjut usia (terutama jika hidup sendiri), ibu rumah tangga dan pekerja kasar.	Kuantitatif	Pendekatan kapabilitas	<p>1) Adanya kekurangan dan ketimpangan dalam ruang <i>functionings</i> dan mereka berkondisi relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kekurangan dan ketimpangan dalam ruang pendapatan</p> <p>2) Ada kaitan antara aspek materi dari kehidupan manusia, seperti perumahan atau kesehatan, dengan kinerja buruk di bidang non-materi tetapi berpengaruh terhadap kesejahteraan (pendidikan dan pengetahuan serta hubungan sosial). Penilaian kesejahteraan individu dilihat dari kondisi kekurangan (yaitu ibu rumah tangga) yang dinyatakan tersembunyi di ketimpangan pendapatan atau analisis kemiskinan, ketika rumah tangga diasumsikan sebagai unit analisis.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
14	Anang Mashudi. 2009. Estimasi Dampak Kebijakan Ekonomi Susu Sapi Perah Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan. Disertasi. Universitas Brawijaya. Fakultas Pertanian. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang.	Mengkaji upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pendapatan peternak, serta meningkatkan daya serap hasil produksi susu segar domestic di pasar bahan baku Industri Pengolahan Susu maupun di pasar konsumsi dalam kondisi perdagangan bebas.	Kualitatif		Penerapan liberalisasi perdagangan susu mengakibatkan penurunan kinerja peternakan rakyat Indonesia karena hilangnya proteksi pemerintah dan lemahnya posisi tawar para peternak.
15	Adi Sutanto. 2008. Efisiensi Usaha Ternak Sapi perah Disertasi. Fakultas Pertanian. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang	Menganalisis perusahaan ternak sapi perah oleh peternak anggota Koperasi SAE di Pujon, mengkaji peran lembaga dalam pengembangan ternak sapi perah, dan menganalisis pendapatan yang dicapai dalam usaha tani ternak sapi perah.	Kuantitatif		Koperasi kurang mempunyai kemampuan optimal khususnya dalam hal penyediaan sarana produksi meliputi penyediaan bibit, pakan konsentrat, pengadaan hijauan serta unit layanan kesehatan. Selain itu diketahui pula, GKSI kurang berperan aktif meningkatkan posisi tawar, yang terkait dengan keseimbangan harga susu dan harga pakan. Pendapatan petani peternak relatif rendah. Hal ini disebabkan produksi dan harga susu yang relatif rendah.

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
16	Krismiwati Muatip. 2008. Kompetensi Kewirausahaan Peternak Sapi Perah : Kasus Peternak Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dan Kabupaten Bandung Jawa Barat. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. IPB.Bogor.	Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan dan produktivitas peternak sapi perah.	Kuantitatif		<ol style="list-style-type: none"> 1) Karakteristik peternak sapi perah (mengakses informasi, motivasi peternak) dalam keadaan rendah. 2) Rata-rata tingkat kompetensi pada tingkat rendah. 3) Lingkungan usaha peternak (ketersediaan sarana, prasarana, informasi, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan peternak, regulasi) pada tingkat rendah. 4) Produktivitas peternak pada tingkat rendah. 5) Faktor karakteristik peternak, lingkungan usaha berpengaruh terhadap kompetensi kewirausahaan peternak. 6) Faktor karakteristik peternak, lingkungan usaha berpengaruh terhadap produktivitas peternak. 7) Kompetensi kewirausahaan berpengaruh terhadap produktivitas peternak.



No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
17	Eyassu Seifu &Reiner Doluschitz. 2014. Analisis of the dairy value chain: Challenges and opportunities for dairy development in Dire Dawa, Eastern Ethiopia. International Journal of Agricultural Policy and Research. 2 (6).	Mengkarakterisasi rantai nilai susu dan mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan industri susu.	Kuantitatif		Peran dan fungsi semua aktor dalam rantai nilai tidak jelas, ada hubungan lemah antara produsen susu (peternak), pedagang dan seluruh pemangku kepentingan industri susu. Tantangannya adalah kendala utamanya yang berkaitan dengan produksi susu. Kekurangan dan tingginya biaya pakan, kurangnya lembaga yang memberikan informasi terkait susu, kesulitan untuk mendapatkan lahan, prevalensi penyakit, kurangnya dukungan teknis, dan kurangnya teknologi susu terkait. Adapun yang berkaitan dengan pemasaran susu termasuk kurangnya kontrol kualitas susu, kurangnya pendinginan dan fasilitas penyimpanan di lokasi penjual susu, rendahnya kualitas susu yang dipasok dari daerah pedesaan, penjualan susu mentah dan pembusukan susu karena kurangnya



No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode	Pendekatan	Hasil Penelitian
					pelestarian dan pengolahan fasilitas.
	KEBARUAN				
	L.V.Ratna Devi S. Keberdayaan Peternak Sapi Perah Dengan Pendekatan Kapabilitas Di Kecamatan Getasan, kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Usulan Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.	Menganalisis Keberdayaan (<i>Achievement Functionings</i>) Peternak melalui: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Functional Commodity</i> ○ <i>Capability Deprivation</i> ○ <i>Ability To Do</i> ○ <i>Freedom Of Choice</i> 	Kuantitatif	Pendekatan Kapabilitas	

Benang merah dari matrik ini adalah bahwa semua penelitian belum ada yang menggunakan 4 (empat) komponen pendekatan kapabilitas untuk mengkaji keberdayaan, kesejahteraan maupun faktor penyebab kemampuan mengkondisikan diri peternak yang kurang memadai. 4 (empat) komponen pendekatan kapabilitas tersebut adalah keberfungsian komoditas (*functional commodity*), keterampilan kemampuan (*capability deprivation*), kapabilitas/kemampuan berpeluang (*capability/ability to do*), dan kebebasan memilih kesempatan (*freedom of choice*).

Kebaruan penelitian yang diajukan didasarkan pada penelusuran berbagai disertasi dan jurnal internasional. Berbagai disertasi yang ditelusuri memiliki fokus kajian keberdayaan yang dikaji dengan berbagai faktor dan menggunakan pendekatan pemberdayaan.

Hasil penelitian yang menunjukkan ketidak keberdayaan (Utami, 2001; Yunasaf, 2008; Marhaeni, 2011; Demartoto, 2012) karena dipengaruhi kualitas perilaku, tingkat kemadirian, peran sebagai inisiator, peran sebagai perencana, peran sebagai investor, peran sebagai pemantau, peran sebagai evaluator, dalam tingkatan rendah dan demografi budaya, hambatan struktural dalam tingkatan

tinggi. Hasil penelitian yang menunjukkan ada keberdayaan (Marhaeni, 2011; Nikmatullah, 2013; Hadi, 2013; Muslim, 2014) karena dipengaruhi motivasi berprestasi, *human capital*, *human social*, psikologis, keberdayaan penilaian hasil-hasil pemberdayaan, komponen input pemberdayaan, komponen proses pemberdayaan, komponen output pemberdayaan.

Para peneliti yang tertelusuri, belum ada yang menggunakan pendekatan kapabilitas. Dalam mengkaji keberdayaan tidak ada yang menggunakan komponen pada pendekatan kapabilitas sebagai faktor pengaruh. Belum ditemukan penelitian yang menggunakan 4 komponen pada pendekatan kapabilitas untuk mengkaji keberdayaan.

Penelusuran jurnal internasional yang dilakukan (Slotje, 1991; Ellman, 1994; Balestrino, 1996; Balestrino & Sciclone, 2001; Phipps, 1999; Marniotti, 2000) berfokus pada kajian kesejahteraan (*well-being*) dengan berbagai *functionings* dan menggunakan pendekatan kapabilitas. Memang *functionings* (*doings dan beings*) dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan (Balestrino & Sciclone, 2001). Dianggap memiliki *functioning* jika memiliki *ability to do* (mampu berpeluang) dan *ability to be* (mampu mengkondisikan diri). Jika telah mampu memiliki keduanya ini, maka sebenarnya orang dapat disebut berdaya atau memiliki keberdayaan.

Para penulis jurnal tersebut, menggunakan pendekatan kapabilitas untuk kajian kesejahteraan, menggunakan *functioning* sebagai faktor pengaruh. Belum ditemukan kajian *functioning* dengan 4 komponen pada pendekatan kapabilitas seperti penelitian yang peneliti ajukan.

Ditelusuri juga disertasi dan jurnal internasional yang berfokus pada susu sapi maupun ternak sapiunya (Mashudi, 2009; Sutanto, 2008; Muatip, 2008; Seifu & Doluschitz, 2014). Adapun sarasannya peternak dan hasil penelitiannya menunjukkan kondisi peternak yang kurang memadai (berpendapatan rendah, posisi tawar rendah, memiliki hubungan yang lemah antara produsen susu/peternak dengan pedagang maupun seluruh pemangku kepentingan industri susu, karakteristik peternak dalam keadaan rendah, rata-rata tingkat kompetensi pada tingkat rendah, lingkungan usaha dalam keadaan rendah, produktivitas

peternak pada tingkat rendah). Meminjam istilah Sen, kemampuan mengkondisikan diri/*ability to be* peternak rendah.

Para peneliti dan penulis jurnal yang tertelusuri hanya memiliki hasil penelitian tentang kondisi diri peternak sapi. Belum ditemukan penelitian yang menghasilkan *functioning* peternak sapi. *Functioning* meliputi dua unsur yaitu kemampuan mengkondisikan diri dan kemampuan berpeluang. Dalam penelitian yang penulis ajukan akan disebut sebagai keberdayaan.

Hasil penelusuran dapat dikatakan bahwa belum ditemukan penelitian yang memiliki kajian *keberdayaan* peternak sapi perah dengan 4 komponen pada pendekatan kapabilitas seperti penelitian yang peneliti ajukan. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji “Keberdayaan Peternak Sapi Perah Dengan Pendekatan Kapabilitas”. Ini adalah kebaruan yang penulis ajukan.

